Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Volume 7 No. 1 (Juni, 2026)
e-ISSN 2776-0030 | p-ISSN 2775-7749
pp. 50-62

Strategi Mitigasi Bencana oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Siti Khoiriah[1], Dewi Septiana[2], Zulpakor Oktoba[3], Reisa Malida[4],
Rifka Yudhi[5] & Dewi Nur Halimah[6].
[1,2,4,5,6] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[3] Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
*Korespondensi: siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

Abstrak

Wilayah pesisir Kota Bandar Lampung merupakan teritori yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya bencana banjir, tanah longsor, dan bencana pesisir. Mitigasi bencana yang terencana dan terkoordinasi efektif sangat dibutuhkan. Sinergitas antar unsur pemerintah, baik pada tingkat pusat, daerah, maupun kecamatan bersama masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilannya. Jurnal ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang pemahaman risiko bencana, langkah pencegahan, serta kesiapan tanggap darurat guna meminimalisir kerugian akan bencana yang dapat terjadi di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Menggunakan paradigma kualitatif melalui desain deskriptif-eksplanatif guna menguraikan fenomena kolaborasi lintas sektoral dalam manajemen risiko bencana di wilayah pesisir Bandar Lampung. Hasil menunjukkan sinergitas pemerintah perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap mitigasi bencana. Dengan sinergitas yang kuat dan berkelanjutan, upaya mitigasi bencana di Kecamatan Teluk Betung Timur akan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi risiko serta dampak bencana secara signifikan..

Kata kunci: Sinergitas, Mitigasi Bencana, Pemerintah, dan Masyarakat.

1. ANALISIS SITUASI

Wilayah pesisir memiliki karakteristik unik dan sumber daya yang sangat beragam sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu dan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Secara ekologis, kawasan pesisir memiliki keterkaitan yang erat antara ekosistem pesisir, wilayah daratan, dan laut lepas. Kerusakan pada salah satu ekosistem, seperti hutan mangrove, akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem lainnya. Selain itu, aktivitas pembangunan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), seperti industri, pertanian, dan permukiman yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, dapat menimbulkan dampak berupa banjir, sedimentasi, serta degradasi lingkungan pesisir dan laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi

DOI: https://doi.org/10.37295/jpdw.v7i1.662

merupakan bagian penting dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan pesisir (Dahuri, 2003).

Kondisi tersebut relevan dengan Kecamatan Teluk Betung Timur yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dan menghadapi berbagai ancaman bencana, seperti banjir rob, gelombang pasang, dan potensi tsunami. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir guna mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir bagi generasi mendatang.

Wilayah pesisir merupakan kawasan di antara daratan dan lautan yang menyediakan sumber daya alam penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Peran penting pesisir Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendukung keseimbangan ekositem dan kesejahteraan masyarakat. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung merupakan kawasan pantai yang rentan terhadap dinamika pasang surut dan banjir rob. Data BMKG menunjukkan bahwa wilayah ini semakin sering terdampak banjir rob akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut. Banjir rob merupakan banjir yang disebabkan gaya tarik benda langit serta faktor perubahan iklim global, kini menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan masyarakat pesisir.

Selain rentan terhadap banjir rob dan bencana pesisir, Kota Bandar Lampung juga merupakan salah satu wilayah yang kerap mengalami bencana banjir. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana yang tercatat pada Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, banjir merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2010 hingga 2019 tercatat sebanyak 14 kejadian banjir dari total 26 kejadian bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Terjadinya banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh terganggunya keseimbangan lingkungan akibat aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (BPBD Kota Bandar Lampung, 2019).

Secara topografi, Kota Bandar Lampung memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0–500 meter di atas permukaan laut (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2016). Kondisi tersebut pada dasarnya memungkinkan air hujan mengalir menuju wilayah yang lebih rendah sehingga risiko genangan dapat diminimalkan. Namun, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, serta meningkatnya aktivitas pembangunan telah menyebabkan fungsi alami lingkungan dalam mengendalikan aliran air menjadi berkurang sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir (Suhardiman, 2012).

Dalam Buku Saku Pengurangan Risiko Bencana 2024 yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung, bahwa Kecamatan Teluk Betung Timur rawan bencana tsunami, kebakaran lahan dan hutan, banjir bandang, dan kekeringan.

Pada awal tahun 2025, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa sebanyak 2.193 rumah di Teluk Betung Timur terdampak banjir dari total sekitar 14.160 rumah yang terkena dampak banjir di seluruh kota Bandar Lampung. Selain itu, bencana banjir ini memengaruhi lebih dari 11.000 jiwa penduduk di berbagai wilayah kota. Kemudian Data statistik awal tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Timur yang teridentifikasi sebagai korban bencana alam mencapai 7.657 jiwa. Secara akumulatif di tingkat kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan 285 tindakan penyelamatan terkait banjir selama tahun 2025, dengan puncak kejadian terjadi pada awal tahun, yaitu bulan Januari (97 kejadian) dan Februari (111 kejadian). Angka keterpaparan yang tinggi di wilayah ini berkaitan erat dengan kepadatan penduduk Teluk Betung Timur yang mencapai 6.456 jiwa/km² serta karakteristik geografisnya yang memiliki 5 kelurahan di wilayah tepi laut (pesisir).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kecamatan Teluk Betung Timur, terungkap bahwa banyak warga yang tinggal di daerah pesisir masih tidak sepenuhnya memahami jalur evakuasi, lokasi kumpul darurat, serta cara-cara menyelamatkan diri ketika bencana melanda. Selain itu hasil pembicaraan dengan pemerintah kecamatan dan warga menunjukkan bahwa program sosialisasi tentang bencana belum dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. Situasi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana dan upaya mitigasi yang tepat. Oleh sebab itu, program pengabdian yang berupa sosialisasi mitigasi bencana sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kemungkinan bencana di kawasan pesisir Teluk Betung Timur.

2. METODE PELAKSANAAN

Studi pengabdian ini mengadopsi paradigma kualitatif melalui desain deskriptif-eksplanatif guna menguraikan fenomena kolaborasi lintas sektoral dalam manajemen risiko bencana di wilayah pesisir Bandar Lampung. Adapun tahapan kegiatan adalah persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Analisis diarahkan pada

sinkronisasi antara mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dengan aksi nyata peningkatan kapasitas kognitif masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mitigasi yang melibatkan akademisi dan praktisi penanggulangan bencana. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sinergitas pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana serta mengedukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Pengabdian dilaksanakan di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, yang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya banjir dan bencana pesisir.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Mitigasi Bencana dalam Literatur

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya tersebut mencakup identifikasi risiko, penyusunan rencana darurat, pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan edukasi masyarakat sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana (Sahudra et al., 2023). Dalam konteks tersebut, edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif karena pengetahuan dan kesadaran kolektif masyarakat merupakan faktor utama dalam pengurangan risiko bencana. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat mengenali potensi ancaman, memahami jalur evakuasi, serta mengambil tindakan yang tepat saat terjadi bencana (Rasidi, 2024).

Selain itu, penguatan kapasitas organisasi masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana. Pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat masyarakat dapat mendukung sistem peringatan dini, koordinasi evakuasi, serta peningkatan kemampuan warga dalam menghadapi keadaan darurat. Melalui pelatihan yang terstruktur, masyarakat dapat memperoleh keterampilan dasar seperti pertolongan pertama, manajemen pengungsian, dan pemetaan risiko sederhana sehingga mampu berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana. Keberadaan kelompok masyarakat tersebut juga dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Marliana et al., 2026).

Tahap pelaksanaan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian, pihak kecamatan, dan BPBD Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat terkait mitigasi bencana. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi mengenai karakteristik ancaman bencana, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih baik. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai pihak, yaitu BPBD Provinsi Lampung, aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur, akademisi Universitas Lampung, mahasiswa KKN Universitas Lampung, serta masyarakat setempat. Berdasarkan pentingnya edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tersebut, kegiatan sosialisasi mitigasi bencana di Kecamatan Teluk Betung Timur dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya banjir, tsunami, dan tanah longsor.

Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memahami kondisi kerawanan di lingkungannya. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat terlibat dalam identifikasi risiko, pengumpulan informasi lapangan, serta penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan sehingga upaya mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif (Ritnawati., et al., 2025).

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur (TBT) merupakan manifestasi dari mandat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kerja sama ini menjadi krusial mengingat TBT secara geografis merupakan wilayah yang memiliki ancaman keterpaparan bencana tsunami dan gempa bumi karena berbatasan langsung dengan Teluk Lampung. Karakteristik wilayah yang terdiri dari perbukitan, seperti Gunung Mastur, Gunung Bakung, dan Gunung Depok, serta wilayah pesisir menuntut adanya koordinasi yang terpadu untuk membangun kapasitas pertahanan mandiri di tingkat lokal. Berdasarkan analisis di Kecamatan Teluk Betung Timur, sinergitas ini diwujudkan melalui beberapa pilar utama konsep sinergitas pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam penanggulangan bencana dikenal sebagai pendekatan pentahelix yang dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta memperkuat tata kelola kebencanaan berbasis kolaborasi (Nugroho et al., 2022; Pratama & Kurniawan, 2023).

a) Penguatan Struktur Kelurahan dan Penggerak Lokal. Sinergi dibangun melalui rantai komando yang menghubungkan kebijakan kota dengan

tindakan riil di lapangan. Kecamatan TBT memiliki 6 Kelurahan, 14 Lingkungan, dan 101 RT yang didukung oleh 12 personel Babinsa/Babinkamtibmas sebagai unsur perlindungan masyarakat. Model ini sejalan dengan strategi nasional dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045 yang menekankan peningkatan kapasitas pemerintah daerah hingga level kelurahan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Keberadaan RT dan Babinsa berfungsi sebagai ujung tombak dalam diseminasi informasi peringatan dini dan penggerak semangat gotong royong warga.

b) Edukasi Terpadu dan Kolaborasi Akademisi. Implementasi sinergitas nyata terlihat dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang melibatkan pemerintah (BPBD Provinsi Lampung), akademisi (KKN Universitas Lampung), dan masyarakat TBT pada 1 Februari 2026. Kegiatan ini membuktikan adanya kolaborasi multi-pihak (*pentahelix*) dalam mentransfer pengetahuan, temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program edukasi kebencanaan mampu meningkatkan literasi risiko dan kesiapsiagaan masyarakat pada wilayah rawan bencana.

c) Integrasi Aspirasi dalam Pembangunan Infrastruktur. Sesuai dengan regulasi daerah, perbaikan sarana dan prasarana umum untuk mitigasi harus memperhatikan aspirasi kebutuhan masyarakat. Di TBT, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan (seperti 2 Puskesmas dan 2 Puskesmas Pembantu yang tersedia di wilayah tersebut) serta jalur evakuasi, sementara masyarakat berperan dalam memastikan standar teknis konstruksi di lingkungan mereka memenuhi persyaratan keselamatan. Sinergi ini memastikan infrastruktur publik seperti sekolah dan puskesmas memiliki ketangguhan struktural terhadap guncangan gempa.

d) Model Mitigasi Berbasis Komunitas (Gotong Royong Tangguh). Mengadopsi model keberhasilan dari daerah lain, sinergitas di TBT diarahkan pada pembentukan komunitas yang tangguh melalui pemanfaatan kearifan lokal. Pemerintah melalui BPBD yang memiliki 23 personel inti di Kota Bandar Lampung memfasilitasi pembentukan relawan bencana di tingkat kelurahan untuk mendukung manajemen logistik dan operasi darurat. Hal ini memastikan bahwa saat terjadi bencana, respons tidak hanya bergantung pada bantuan pusat tetapi dimulai dari kesiapan internal masyarakat desa/kelurahan itu sendiri. Pendekatan mitigasi berbasis komunitas telah banyak diterapkan di berbagai daerah rawan

bencana di Indonesia karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini lokal, dan mempercepat respons saat terjadi bencana (Sari et al., 2021; Wibowo et al., 2023).

Secara keseluruhan, sinergitas di Kecamatan Teluk Betung Timur telah menunjukkan kemajuan melalui integrasi data kependudukan mencapai 67,1 ribu jiwa dengan program-program mitigasi partisipatif. Efektivitas sinergi ini sangat bergantung pada keberlanjutan komunikasi antara perangkat daerah dengan warga guna memastikan standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan bencana terpenuhi secara menyeluruh.

Model Mitigasi Bencana di Kecamatan Teluk Betung Timur

Mitigasi bencana di Kecamatan Teluk Betung Timur (TBT) didefinisikan sebagai rangkaian upaya sistematis untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (non-struktural). Mengingat posisi geografis TBT yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan memiliki bentang alam perbukitan seperti Gunung Mastur, Gunung Bakung, dan Gunung Depok, strategi mitigasi di wilayah ini difokuskan pada dua ancaman utama: tsunami akibat aktivitas *megathrust* Selat Sunda dan tanah longsor di area lereng. Adapun upaya dari pemerintah setempat, mengimplementasikan mitigasi bencana dalam beberapa rencana strategis, yakni:

1. Mitigasi Struktural dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023, setiap pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana TBT wajib menerapkan standar teknis bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di area pesisir agar tidak meningkatkan kerentanan penduduk. Salah satu langkah fisik yang diatur dalam rencana kontingensi adalah penyiapan lokasi evakuasi spesifik, di mana untuk wilayah TBT, Perumahan Villa Gardenia ditetapkan sebagai lokasi pos lapangan utama karena letaknya yang berada di ketinggian yang aman dari jangkauan tsunami.
2. Mitigasi Non-Struktural: Edukasi dan Sosialisasi Peningkatan kapasitas masyarakat (kognitif) menjadi prioritas utama untuk membangun budaya sadar bencana. Bentuk nyata dari upaya ini adalah penyelenggaraan sosialisasi mitigasi bencana yang dilaksanakan pada 1 Februari 2026 di

TBT, yang melibatkan BPBD Provinsi Lampung dan akademisi (KKN Universitas Lampung). Program ini bertujuan agar warga mampu melakukan evakuasi mandiri dalam waktu kurang dari enam jam setelah peringatan dini dikeluarkan, sesuai dengan target standar di pelayanan minimal (SPM) penanggulangan bencana.

3. Sistem Peringatan Dini dan Diseminasi Informasi Sesuai Mandat Regulasi, Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami dan gempa bumi kepada masyarakat di kawasan pesisir TBT melalui berbagai saluran komunikasi. Efektivitas mitigasi ini bergantung pada pemutakhiran data secara berkala dan pengamatan gejala bencana yang memperhatikan kearifan lokal penduduk setempat. Pemanfataan teknologi informasi yang akurat diperlukan untuk memastikan pesan keselamatan sampai kepada 67,1 ribu jiwa penduduk TBT, terutama kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Pengabdian

Implementasi sinergitas antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur (TBT) berpijak pada mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengutamakan partisipasi publik dan kemitraan sebagai pilar utama penanggulangan bencana. Sinergi ini bertujuan membangun budaya sadar bencana melalui integrasi antara kebijakan pemerintah pusat, seperti dengan aksi nyata di tingkat lokal guna menurunkan indeks risiko bencana di TBT, keberhasilan sinergitas ini terlihat dari bagaimana peran perangkat daerah (6 Kelurahan dan 101 RT) berkolaborasi dengan Babinsa/Bhabinkamtibmas dalam memastikan informasi peringatan dini.

Tahapan persiapan, akademisi Universitas Lampung (Unila) berkoordinasi dengan Camat Teluk Betung Timur untuk memahami karekteristik pesisir dan masyarakat Teluk Betung Timur. Dalam perencanaan program kerja mahasiswa KKN Unila di bawah koordinasi dosen pembimbing lapangan juga memuat kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan kali dan pesisir di Kecamatan Teluk Betung Timur.

Dalam Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Mitigasi Berbasis Pentahelix: Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 1 Februari 2026 melibatkan kolaborasi antara BPBD Provinsi Lampung, akademisi Universitas Lampung, dan masyarakat Teluk Betung Timur untuk meningkatkan literasi kebencanaan dan identifikasi area rawan secara partisipatif.

Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat merupakan kunci sukses dalam mitigasi atas musibah agar lebih efektif dan tepat waktu, Melalui semangat gotong royong, masyarakat secara mandiri melakukan mitigasi struktural dengan mengidentifikasi bangunan tahan gempa serta mematuhi instruksi keselamatan dari pemerintah. Dengan sinergi yang terus dievaluasi dan ditingkatkan, Kecamatan Teluk Betung Timur diharapkan mampu mewujudkan ketangguhan bencana yang berkelanjutan, meminimalkan kerugian fisik dan ekonomi, serta melindungi kehidupan setiap individu di dalamnya, tempat pelaksanaan di kantor kecamatan.

Dalam sambutannya ketua Pengabdian kepada Masyarakat Berdampak menjelaskan bahwa sebagai dosen di perguruan tinggi di Indonesia semua memiliki kewajiban utnuk melaksnakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketua PkM yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung menyampaikan bahwa Kota Bandar Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya semua masyarakat Kota Bandar Lampung sangat penting untuk berpartisipasi, demikian hal nya dengan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur. Mitigasi bencana yang dinahkodai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Sinergi bersama masyarakat tentu akan membuahkan hasil yang jauh lebih optimal dan berkelanjutan. Mari bersama-sama membangun bangsa ini kedepan lebih baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya pemateri dari BPBD Provinsi Lampung menyampaikan pentingnya membangun sinergitas dalam mitigasi bencana antara pemerintah bersama dengan masyarakat. Materi yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat dari BPBD Provinsi Lampung.

a) Identifikasi Karakteristik Bahaya Penjelasan mengenai kerentanan wilayah Teluk Betung Timur terhadap ancaman tsunami dan gempa bumi, mengingat lokasinya yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan keterpaparan terhadap potensi megathrust Selat Sunda.
b) Pemetaan Area Rawan Lokal Pemaparan mengenai risiko spesifik di TBT yang memiliki topografi campuran antara kawasan pesisir/pantai serta daerah perbukitan seperti Gunung Mastur, Gunung Bakung, dan Gunung Depok yang juga rawan longsor.
c) Sistem Peringatan Dini dan Respon Cepat Sosialisasi mengenai cara memahami instruksi peringatan dini dan pentingnya melakukan evakuasi

mandiri dalam waktu kurang dari enam jam guna memenuhi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.

d) Mitigasi Non-Struktural dan Edukasi Menekankan pada peningkatan kapasitas kognitif masyarakat untuk mengenali jalur evakuasi dan menetapkan titik aman, seperti Perumahan Villa Gardenia yang dijadikan lokasi pos lapangan utama karena letak geografisnya yang lebih tinggi.
e) Pembangunan Budaya Sadar Bencana Mengajak warga untuk beralih dari sekadar objek menjadi subjek mitigasi yang aktif dalam menjaga lingkungan, seperti melakukan penghijauan lahan untuk menstabilkan lereng di area perbukitan .
f) Peran serta masyarakat dapat dibangun melalui, antara lain: membangun kesiapsiagaan dari dalam rumah, menjadi "mata dan telinga" lingkungan, aktif dalam kelompok siaga bencana kelurahan, dan menjaga budaya gotong royong sebagai benteng.
g) Komitmen bersama dibangun dengan sinergi tanpa henti; mulai dari langkah kecil, hari ini; wariskan budaya selamat; dan komitmen kolektif untuk menjaga lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya sadar bencana. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengurangan risiko bencana dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana secara mandiri. Selain itu, penyebaran informasi kebencanaan dan simulasi secara berkala dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang (Ritnawati., et al., 2025).

Gambar 1. Penyampaian Materi
Sumber: Dok. Pengabdian,

Evaluasi

Evaluasi bersama menghasilkan bahwa pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus menerus dan berkelanjutan, sehingga masyarakat selalu ingat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Masyarakat juga berkomitmen untuk menjaga pesisir di Kecamatan Teluk Betung Timur.

4. PENUTUP

Sinergitas antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat sangat berperan penting dalam keberhasilan mitigasi bencana di wilayah pesisir. Keberhasilan mitigasi bencana akan berdampak positif pada keberlanjutan alam dan kesinambungan sosial upaya melestarikan ekosistem dan sumber daya alam agar tetap terjaga untuk generasi mendatang di wilayah pesisir.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah

menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada: Universitas Lampung, BP KKN Universitas Lampung, Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung, Camat Teluk Betung Timur, Masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Mahasiswa KKN Unila Periode 1 Tahun 2026 di Kecamatan Teluk Betung Timur.

6. DAFTAR PUSTAKA

BPBD Kota Bandar Lampung. (2024). *Buku Saku Pengurangan Risiko Bencana 2024* Kota Bandar Lampung: Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung. (2019). *Laporan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung (2025) *Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025* (Bandar Lampung: BPBD Kota Bandar Lampung, 2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, *Kecamatan Teluk Betung Timur Dalam Angka 2026* (Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung, 2026).

Dahuri, R. (2003). Mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia. *Jurnal Alami*, 8(2), 1–8.

Materi dari BPBD Provinsi Lampung, Sinergitas Bencana oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Marliana, T., dkk. (2026). Edukasi Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat di Wilayah Rawan Risiko. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 21800–21811.

Nugroho, A., dkk. (2022). Model Pentahelix dalam Pengurangan Risiko Bencana. Jurnal Kebencanaan Indonesia.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041* (Bandar Lampung: Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, 2021).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rasidi, R. (2024). Strategi pendidikan mitigasi bencana berbasis masyarakat: memperkuat kapasitas lokal untuk menghadapi perubahan iklim di Indonesia. *Borobudur Educational Review*, 4(1), 1–14.

Rahmawati, D., dkk. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Literasi Kebencanaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Ritnawati, dkk. (2025). *Manajemen Bencana Banjir: Dari Mitigasi hingga Pemulihan*. Yayasan Kita Menulis.

Sahudra, T. M., Rachmatsyah, Kenedi, A. K., Firdaus, C. R., Wardhana, M. R., & Nasution, R. A. (2023). *Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Etno-Sosial Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

Sari, N., dkk. (2021). Community Based Disaster Risk Reduction di Wilayah Pesisir Indonesia. *Jurnal Geografi*.

Suhardiman. (2012). *Pengelolaan Drainase dan Kerawanan Banjir Perkotaan*. Jakarta.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, 2018.